



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa , karena atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Tahun 2021. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unit Eselon II di Bappebti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 865 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI Tahun 2021 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja Sekretariat BAPPEBTI selama Tahun 2021 dan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya, sehingga tujuan dan sasaran BAPPEBTI dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Sekretariat BAPPEBTI Tahun 2021 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Februari 2022

Sekretaris



Tuti Prahasuti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis Sekretariat Bappebti adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti. Dalam hal membangun daya saing yang berkelanjutan diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki.

Capaian kinerja Sekretariat Bappebti Tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan hasil realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun 2021 di dalam kontrak kinerja Sekretariat Bappebti. Sasaran kinerja Sekretariat Bappebti Tahun 2021 yaitu meningkatnya pelayanan dukungan teknis dan administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Bappebti Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021 (%)
1	Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan	85%	84.40	99.29
2	Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Nilai 82	95.78	116.80
3	Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	82%	93.01	113.42
4	Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik	78%	84.73	108.62

Capaian target indikator kinerja utama (IKU) di tahun 2021 secara rata-rata adalah sebesar 109,53 % atau tergolong sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud. Faktor-faktor utama yang menjadi keberhasilan tersebut yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya

Manusia yang cukup memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.

Meskipun tingkat capaiannya sudah sangat baik namun pada prakteknya masih terdapat kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran yaitu adanya penghematan atau anggaran yang diblokir sehingga menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan. Adapun upaya – upaya yang telah dilakukan Sekretariat Bappebti dalam mengatasi hambatan atau kendala – kendala tersebut di atas adalah dengan terus berupaya meningkatkan koordinasi antar unit Eselon II di Bappebti dan juga melaksanakan kegiatan yang bersifat tender (pengadaan) sejak awal tahun tanpa harus menunggu pertengahan tahun atau mendekati akhir tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu di lakukan langkah – langkah evaluasi dan koordinasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, serta percepatan realisasi anggaran dan kegiatan agar menjadi lebih optimal capaiannya pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Tujuan	1
B. Peran Strategis Organisasi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Isu Strategis Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	
1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bappebti	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja	
3. Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Sekretariat Bappebti Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 2.1	Indikator Sasaran Kegiatan Sekretariat Bappebti Periode 2020 – 2024	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Bappebti Tahun 2021	8
Tabel 3.1	Kriteria Mutu Pelayanan.....	9
Tabel 3.2	Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat 2021	10
Tabel 3.3	Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2021	11
Tabel 3.4	Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2021	14
Tabel 3.5	Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2021.....	18
Tabel 3.6	Workshop Bappebti Tahun 2021	22
Tabel 3.7	Pelatihan Bappebti Tahun 2021.....	24
Tabel 3.8	Hibah BMN yang telah selesai pada tahun 2021.....	25
Tabel 3.9	Proses BAST/NH untuk Pengadaan Tahun 2010	27
Tabel 3.10	Rekapitulasi Kegiatan Pendukung IK-4 Tahun 2021.....	29
Tabel 3.11	Diseminasi Informasi Bappebti Tahun 2021.....	32
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Sekretariat Bappebti Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Tujuan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan perbaikan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan (merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012). Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794 Tahun 2015 ini telah diterapkan di tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP berupa penghitungan tingkat kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian *reward and punishment*, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi dan capaian kerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya yaitu perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan fungsi evaluasi sulit untuk dipisahkan. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ada. Dalam beberapa hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun demikian, evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pada organisasi instansi saja, namun melibatkan data dari luar instansi untuk mengetahui respon pihak luar terhadap kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan tingkat di Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Perdagangan serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Sekretariat yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan unit Eselon I dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2021.

B. Peran Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Bappebti mempunyai melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan

Sekretariat Bappebti mempunyai fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
3. pelaksanaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Badan'
4. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
5. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
6. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang perdagangan berjangka komoditi;
7. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
8. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Badan

Sebagai unit pendukung BAPPEBTI, peran Sekretariat sangat besar dalam memperlancar pelaksanaan unit-unit teknis. Perubahan iklim global dan adanya perubahan indikator makro ekonomi nasional, maka hambatan terhadap APBN melalui pemotongan anggaran atau penundaan kegiatan dapat segera diselesaikan. Untuk itu Sekretariat BAPPEBTI dengan cermat mengamati perkembangan lingkungan internal maupun eksternal.

C. Struktur Organisasi

Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1
SDM Sekretariat Bappebti

Nama Jabatan	Jumlah
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
Administrator (Eselon III)	1
Pengawas (Eselon IV)	1
Pelaksana	19
Jabatan Fungsional	16
1. Analis Kepegawaian	3
2. Pustakawan	1
3. Analis Kebijakan	3
4. Pranata Humas	1
5. Arsiparis	1
6. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1
7. Analis Anggaran	1
8. Perencana	3
9. Analis Pengelolaan Keuangan APBN	5
10. Pranata Keuangan APBN	3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34
Jumlah Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNP)	24
Total Pegawai	58

D. Isu Strategis Organisasi

Keterbatasan kualitas SDM di sektor perdagangan menyebabkan Bappebti menaruh perhatian utama dalam rencana pembangunan sektor perdagangan dalam lima tahun kedepan. Sumber daya manusia sektor PBK, SRG, dan PLK terbagi menjadi sumber daya manusia sektor perdagangan secara internal dan eksternal. SDM internal adalah aparatur Bappebti, sementara SDM eksternal Bappebti adalah para pelaku usaha,

calon eksportir, pengelola pasar rakyat, dan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia sektor sektor PBK, SRG, dan PLK masih perlu di tingkatkan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tersebut. Dalam upaya penanganannya, Bappebti perlu secara continue menyelenggarakan pelatihan terhadap SDM sektor sektor PBK, SRG, dan PLK secara eksternal, seperti Pertemuan Teknis dalam rangka sosialisasi ketentuan atau aturan baru; pelatihan teknis penyelenggara an SRG dan PLK; pelatihan teknis untuk pelaku usaha PBK. Sementara salah satu tantangan dari SDM internal Bappebti adalah meningkatkan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah untuk membangun nilai-nilai Kementerian Perdagangan dan Bappebti yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan publik. Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan juga perlu terus meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Pengembangan sumber daya aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Bappebti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kondisi suatu sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis perlu menganalisis tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada sebagai perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah. Di dalam SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Sesuai arah kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke depan secara konsisten mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 bidang perdagangan. Kebijakan Sekretariat BAPPEBTI dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menciptakan perdagangan yang aman dan tertib. Perdagangan yang aman dan tertib (teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat) diwujudkan melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan dan pengurangan berbagai bentuk penyimpangan.
- b. Menciptakan perdagangan yang transparan. Transparansi PBK, SRG dan PL yang dapat dicapai melalui penegakan hukum, pengaturan tata tertib perdagangan dan memberikan perlakuan yang sama.
- c. Menciptakan PBK, SRG dan PL yang memberikan kontribusi kepada ekonomi Indonesia (pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan).
- d. Memberikan kontribusi yang nyata terhadap ekonomi Indonesia diwujudkan melalui peningkatan kinerja perdagangan yang mengutamakan pengelolaan resiko, dan penciptaan kesempatan kerja.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, Sekretariat BAPPEBTI menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penataan organisasi sesuai kebutuhan dengan uraian tugas yang jelas;
- b. Penempatan pegawai sesuai dengan pengalaman dan keahliannya;
- c. Peningkatan kemampuan substansi dan teknis pegawai melalui pendidikan / pelatihan;
- d. Penetapan standar pendidikan / pelatihan dan penyaringan yang ketat bagi para pelaku pasar melalui ujian profesi;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai untuk memperlancar operasional kegiatan sehari-hari;
- f. Penegakan disiplin secara tegas dan adil dalam menegakan integritas institusi.

BAPPEBTI telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya tercantum penetapan Sasaran Kegiatan masing-masing unit Eselon II BAPPEBTI selama tahun 2020-2024 dimana salah satunya adalah Sasaran Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI Periode 2020-2024

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kepuasan layanan penyusunan program, anggaran dan pelaporan	Persentase	80	85	90	95	100
2	Nilai tata kelola pengelolaan keuangan di lingkungan BAPPEBTI	Nilai	75	82	85	88	90
3	Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran di lingkungan BAPPEBTI	Persentase	80	82	85	87	90
4	Persentase kepuasan publik terhadap layanan kehumasan BAPPEBTI	Persentase	75	78	80	85	90

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2021

B. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Bappebti, disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rincian alokasi anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama 1 (satu) periode tahun anggaran. Pada tahun 2021, Sekretariat BAPPEBTI dengan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Pagu Revisi menjadi Rp 38.271.685.000,- Dari pagu tersebut, nilai pagu untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 22.347.470.000,-. Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI pada tahun 2021 adalah Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat BAPPEBTI pada tahun 2021 adalah Meningkatnya pelayanan dukungan teknis dan administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk melaksanakan sasaran tersebut disusun beberapa Indikator Kegiatan Kegiatan (IKK) yaitu :

- Persentase Kepuasan Layanan penyusunan program, anggaran, dan pelaporan
- Nilai tata kelola pengelolaan keuangan
- Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran
- Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja, telah disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Bappebti tahun 2021 yang memuat tentang nilai kuantitatif setiap indikator kinerja sasaran dalam satu tahun. Hal ini dimaksud untuk membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi organisasi.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat BAPPEBTI Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PREDIKSI CAPAIAN (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Persentase Kepuasan Layanan penyusunan program, anggaran, dan pelaporan	85%	80	85	90	100
		Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Nilai 82	80	85	90	100
		Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	82%	80	85	90	100
		Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik	78%	80	85	90	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis dan evaluasi akuntabilitas akan menjabarkan hasil evaluasi capaian indikator-indikator kinerja Sekretariat BAPPEBTI menurut sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis secara lebih terperinci dalam menggambarkan perkembangan setiap sasaran dan indikator-indikatornya. Sub bab ini juga mengulas kembali capaian IKU yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga terlihat keterkaitan antara IKU dan indikator lainnya dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Metodologi pengukuran pencapaian dalam indikator kinerja secara umum digunakan dua jenis yaitu metode survey melalui kuisioner dan penilain dari Kemenkeu.

Penggunaan metode survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian pada Indikator Kinerja I, III, dan IV. Sedangkan untuk hasil capaian Indikator Kinerja II adalah dengan mendapatkan Nilai tata kelola pengelolaan keuangan atau nilai capaian IKPA dari Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Tabel 3.1
Kriteria Mutu Pelayanan

A	Sangat Baik	:	88,31-100
B	Baik	:	76,61-88,30
C	Kurang Baik	:	65,00-76,60
D	Tidak Baik	:	25,00-64,99

Berdasarkan Rencana Strategis Bappebti Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAPPEBTI untuk 5 tahun. Dari Renstra tersebut, dapat disebutkan sasaran dari Sekretariat BAPPEBTI, yaitu:

SASARAN STRATEGIS :

“Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”

Secara umum, kinerja Sekretariat BAPPEBTI pada sasaran tersebut di atas telah memberikan capaian yang baik dengan angka capaian rata-rata yang sesuai target.

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini yang selanjutnya disingkat menjadi IK, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021 (%)
1	Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan	85%	84.40	99.29
2	Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Nilai 82	95.78	116.80
3	Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	82%	93.01	113.42
4	Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik	78%	84.73	108.62
Rata-rata Capaian				109.53

Berdasarkan capaian kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa pada LAK Sekretariat BAPPEBTI Tahun 2021 telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan di awal tahun. Hal tersebut terlihat dari rata-rata capaian kinerja Sekretariat yang mencapai sebesar 109.53%. Berikut disampaikan analisis dan evaluasi dari capaian IKU Sekretariat BAPPEBTI pada periode Tahun 2021:

IK-1: Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, dan Pelaporan

Untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dengan memperhatikan ukuran baik dari segi efektifitas maupun efisiensi, ketepatan waktu dan biaya yang digunakan sehingga mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan mengacu pada anggaran berbasis kinerja, maka perlu Program Kerja yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Program kerja tersebut harus mengacu pada kebijakan

pemerintah dan bersinergi dengan kegiatan lain, sehingga target dan sasaran organisasi dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Disamping rencana kerja, dalam suatu organisasi juga diperlukan anggaran yang menggambarkan anggaran untuk membiayai kegiatan yang dibuat dalam rencana. Anggaran dapat membantu organisasi dalam menjalankan usahanya selama tahun berjalan. Sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, anggaran mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak pula persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi memiliki kaitan erat dengan penyusunan rencana, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja dan evaluasi kegiatan.

Rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat dan dilaksanakan harus dilakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan dari rencana yang dibuat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Sekretariat sebagai unit yang memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis kepada unit Eselon II lainnya berusaha memberikan pelayanan yang baik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik termasuk layanan dalam penyusunan program, anggaran dan pelaporan Bappebti.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan	85%	84.40%	99.29

Sumber : Sekretariat Bappebti, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan pada tahun 2021 tercapai sebesar 84.40% atau 99.29% dari target tahun 2021.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, dan Pelaporan (PAP) mencapai indeks kepuasan layanan sebesar 84,403.

Berdasarkan pedoman, nilai indeks kepuasan masyarakat ini termasuk ke dalam mutu layanan 'B', dengan kriteria layanan 'Baik'. Jika melihat dari lima aspek yang dinilai maka aspek sarana dan prasarana (*tangible*) merupakan aspek yang mempunyai nilai dibawah dari indeks kepuasan layanan PAP. Bila dibandingkan dengan target 2021, indikator Persentase kepuasan layanan penyusunan program, anggaran dan pelaporan tidak tercapai karena adanya persepsi yang mempunyai nilai rendah dibawah dari indeks kepuasan adalah pertanyaan nomor 8 dan 9 yaitu terkait "sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai untuk melakukan konsultasi" dan "kenyamanan ruangan dalam melayani unit kerja". Hasil ini menjelaskan bahwa terkait sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan PAP dan ruangan yang dimilikinya dianggap perlu untuk ditingkatkan kepuasannya lagi.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pada 2021 terjadi kenaikan sebesar 4,7% dimana capaian Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan pada 2020 tercapai sebesar 80.61%. Apabila capaian Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 100% maka capaian Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan tahun 2021 terhadap target 2024 tercapai sebesar 84,40%.

Untuk mencapai nilai persentase kepuasan layanan penyusunan program, anggaran dan pelaporan yang optimal, dilakukan beberapa kegiatan pendukung seperti :

- a. Penyusunan dan Koordinasi Program Kerja BAPPEBTI. Kegiatan ini berupa koordinasi dan penyelenggaraan konsinyering penyusunan dan pembahasan Program Kerja dan Anggaran termasuk di dalamnya partisipasi dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan. Pada penyusunan Program kerja dilakukan sinkronisasi dan klarifikasi jadwal BAPPEBTI selama tahun 2021.
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEBTI. Kegiatan ini berupa rapat persiapan, rapat pembahasan yang bertujuan sebagai pedoman rencana kerja pada tahun 2022. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Renja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan..
- c. Penyusunan dan Revisi RKAKL BAPPEBTI meliputi pembahasan-pembahasan terkait anggaran RKA-K/L, penyusunan RKA-K/L BAPPEBTI, serta partisipasi dalam rangka forum konsultasi pembangunan (FKP) Kementerian Perdagangan. Pada 2021 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali revisi RKA-K/L sehubungan dengan adanya refocusing anggaran TA 2021.
- d. Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi meliputi rapat pembahasan dan penyusunan RKA-K/L untuk masing-masing daerah penerima Dana Dekonsentrasi. Pada

Triwulan III telah dilakukan penyusunan RKA-K/L Dana Dekonsentrasi untuk daerah penerima Dana Dekonsentrasi Pasar Lelang Komoditas.

- e. Penyusunan Laporan Triwulan BAPPEBTI dilakukan dengan tujuan mengevaluasi pencapaian kinerja atas realisasi anggaran BAPPEBTI per triwulan sesuai indikator yang tercantum dalam perjanjian kinerja BAPPEBTI, meliputi rapat pembahasan dan penyusunan laporan triwulan dan tahunan;
- f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI dilakukan dengan tujuan mengevaluasi pencapaian realisasi anggaran dan kegiatan (Kinerja) BAPPEBTI selama tahun berjalan. Bentuk kegiatannya meliputi rapat pembahasan tim, konsinyering, penyusunan dan pencetakan LAK;
- g. Evaluasi Program Kerja BAPPEBTI dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja BAPPEBTI selama tahun berjalan serta mengidentifikasi hambatan atau kendala untuk penyusunan kerja yang lebih baik di tahun mendatang;
- h. Penyusunan Laporan *e-Monitoring*. Kegiatan ini berupa pembentukan tim monitoring realisasi anggaran yang telah tercapai di BAPPEBTI secara berkala dan melakukan evaluasi dari realisasi tersebut;
- i. Penyusunan Laporan RDP dengan DPR dilakukan untuk memenuhi jawaban serta menyiapkan data/dokumen pendukung atas pertanyaan yang diajukan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI;
- j. Dukungan Rapat Pimpinan meliputi kegiatan rapat persiapan, rapat pembahasan serta penyelenggaraan konsinyering dukungan rapat pimpinan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kegiatan yang sudah ditentukan seringkali mengalami perubahan karena adanya kegiatan prioritas yang sifatnya mendadak;
- b. Tenggang waktu penyusunan program kerja yang terbatas sehingga membutuhkan koordinasi dengan Unit Eselon II lain yang lebih intensif
- c. Adanya beberapa sistem monitoring dan evaluasi yang ada sehingga diperlukan integrasi sistem untuk memudahkan proses penginputan

Untuk memaksimalkan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan yang dilakukan ke depannya adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Unit Eselon II Bappebti sehingga Sekretariat Bappebti lebih optimal dalam memberikan

layanan dukungan manajemen khususnya terkait penyusunan program, anggaran dan pelaporan dengan baik.

IK-2: Nilai Tata Kelola Pengelolaan Keuangan

Aspek keuangan merupakan bagian penting dalam suatu unit kerja atau organisasi. Tertib pengelolaan keuangan akan berdampak positif terhadap sistem pengelolaan organisasi secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi merupakan aspek penting untuk membangun tata kelola organisasi yang sehat dan kredibel.

Untuk mengukur Nilai Tata Kelola Pengelolaan Keuangan maka Sekretariat Bappebti menggunakan standar dan parameter di dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Nilai 82	95.78	116.80

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai tata kelola pengelolaan keuangan atau nilai capaian IKPA tahunan pada tahun 2021 tercapai sebesar 95.78 atau 116.80% dari target tahun 2021. Nilai capaian IKPA pada tahun 2021 meningkat bila dibandingkan dengan capaian nilai IKPA pada tahun 2020 yang mencapai nilai 95.18. Apabila capaian Nilai tata kelola pengelolaan keuangan dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 90 maka capaian Nilai tata kelola pengelolaan keuangan tahun 2021 terhadap target 2024 tercapai sebesar 106.42%.

Tercapainya target Nilai tata kelola pengelolaan keuangan karena

- adanya kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan dokumen keuangan secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan yang meliputi parameter penilaian yang tercantum dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit Eselon II Bappebti sehingga dokumen pertanggungjawaban maupun pencairan anggaran dapat berjalan dengan baik.
- adanya kesesuaian antara rencana penarikan anggaran dengan pelaksanaan anggaran.
- Adanya kepatuhan terhadap pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pelaporan Keuangan, Laporan Perbendaharaan Pengeluaran dan Penerimaan Negara.

Untuk mendukung pencapaian Nilai Tata Kelola Keuangan dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung seperti :

a. Pengelolaan Keuangan Satker Bappebti

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menunjang pengelolaan keuangan di lingkungan satuan kerja BAPPEBTI yang berupa pengadministrasian dokumen pertanggungjawaban keuangan, tim pengelola keuangan dan verifikasi. Selain itu, kegiatan ini juga berbentuk koordinasi antara Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI dengan para pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan pada Unit Eselon II BAPPEBTI dan Biro Keuangan serta Itjen Kementerian Perdagangan, dan juga dengan instansi lain yang merupakan Pembina pengelola keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) seperti KPPN Jakarta VI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen SAI Kemenkeu serta Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta dengan Intansi Pemeriksa antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP.

Diharapkan dengan pengelolaan administrasi keuangan Satker BAPPEBTI berjalan dengan baik, maka tentunya dokumen pertanggungjawaban dapat tersimpan dengan baik, koordinasi dengan unit Pembina berjalan dengan lancar sehingga besar harapannya pelaksanaan anggaran di lingkungan Satker BAPPEBTI dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Satker BAPPEBTI seperti :

- Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran beserta dokumen pendukung
 - Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - Mengelola Uang yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran;
 - Memproses Potongan Pajak yang belum disetor
- b. Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Satker BAPPEBTI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan / Audit
- Kegiatan ini merupakan koordinasi proses audit / pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Inspektorat Jenderal dan BPK serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil Pemeriksaan oleh institusi dimaksud. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dengan Unit Eselon II di lingkungan BAPPEBTI, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dinas yang menangani perdagangan di daerah. Terlaksananya kegiatan ini, BAPPEBTI sebagai auditee / pihak yang diperiksa dapat menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan / audit dengan baik dan benar serta dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan demikian dapat tercapai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien.
- c. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker BAPPEBTI
- Kegiatan ini merupakan wujud implementasi dan proses pemantauan pelaksanaan anggaran Satker BAPPEBTI di mana target-target realisasi sebagaimana tercantum dalam DIPA Satker BAPPEBTI dapat tercapai. Dalam kegiatan ini, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Eselon II di lingkungan BAPPEBTI, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendag dan KPPN Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan indikator – indikator pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam sistem / aplikasi KPPN dapat tercapai dengan baik, sehingga penilaian terhadap Satker BAPPEBTI mendapatkan hasil yang baik
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Satker BAPPEBTI
- Kegiatan ini dalam rangka penyusunan laporan keuangan satker BAPPEBTI yang meliputi laporan keuangan setiap semester dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat memenuhi asas transparansi dan benar serta disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyusunannya, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal

serta pihak-pihak yang berwenang seperti KPPN Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta BPK. Laporan Keuangan yang dapat memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan akan menjadi dasar bagi para auditor baik internal maupun eksternal untuk memberikan penilaian atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Satker BAPPEBTI.

Pada tahun 2021 telah dilakukan kegiatan untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Satker BAPPEBTI seperti :

- Laporan Keuangan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Periode Tahunan 2020 telah disusun serta telah dikompilasi menjadi Laporan Kementerian Perdagangan serta telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI yang merupakan Opini tertinggi atas pemeriksaan keuangan;
 - Melakukan Rekonsiliasi internal antara aplikasi Persediaan, BMN, dan Saiba;
 - Melakukan Rekonsiliasi eksternal antara Satuan Kerja dengan KPPN Kementerian Keuangan;
 - Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait Audit Laporan Keuangan;
 - Melakukan penyusunan akhir Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Periode Semester 1 Tahun 2021 sebagai dasar Laporan Keuangan Tingkat Kementerian.
- e. Pengelolaan PNBPN Satker BAPPEBTI

Kegiatan ini merupakan pengadministrasian aspek-aspek yang tercakup dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi penerimaan berupa denda atas ketidakpatuhan pelaku usaha PBK dan biaya pendaftaran untuk memperoleh ijin dari para pelaku PBK. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Eselon II BAPPEBTI, dan Biro Keuangan Kementerian Perdagangan. Dengan terlaksananya, kegiatan ini, diharapkan pengelolaan PNBPN pada Satker BAPPEBTI dapat dilaksanakan dengan benar dan transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAPPEBTI menerima PNBPN yang bersumber dari layanan perizinan, pelaksanaan ujian profesi WPB dan pengenaan denda terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan dimana PNBPN ini perlu dikelola dengan baik. Pada tahun 2021 target PNBPN BAPPEBTI ditetapkan sebesar Rp1.1 M.

Di Tahun 2021 jumlah PNBPN BAPPEBTI mencapai Rp 645,900,000,-

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan pada tahun 2021 terdapat beberapa kendala seperti :

- Koordinasi antara Para Pengelola Keuangan selama Pandemi / pada saat pemberlakuan PSBB/ PPKM lebih sulit dilakukan sehingga jika ada permasalahan proses perbaikannya menjadi lebih lama;
- Banyaknya aplikasi yang digunakan oleh KPPN / Kementerian Keuangan dimana setiap aplikasi memiliki parameter yang berbeda sehingga terkadang membuat kerancuan data yang dipakai.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu menjalin sinergitas yang lebih erat dengan pihak internal dalam hal ini Unit Eselon II Bappebti maupun pihak eksternal seperti KPPN sehingga bila terjadi kendala bisa segera melakukan tindakan.

IK-3: Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan sempurna. Tahap pengembangan sumber daya manusia ini terdapat dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksudkan agar potensi yang dimiliki pegawai dapat digunakan secara efektif.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (*workshop*) bagi para pegawai serta pelatihan khusus lainnya yang dapat mendukung kompetensi pegawai BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran	82%	93.01%	113.42

Berdasarkan hasil survey untuk mengetahui Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran yang dilakukan Sekretariat BAPPEBTI pada tahun 2021 tercapai sebesar 93,01% atau tercapai sebesar 113,42% dari target tahun 2021.

Berdasarkan pedoman, nilai indeks kepuasan masyarakat ini termasuk ke dalam mutu layanan 'A', dengan kriteria layanan 'Sangat Baik'. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa aspek ketanggapan (responsiveness), keandalan (reliability), dan sarana dan prasarana 41 (tangible), sehingga ketiga aspek ini dapat dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan kepegawaian dan umum sehingga indeks kepuasan dapat dipertahankan.

Bila dibandingkan dengan capaian Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran pada tahun sebelumnya, dimana capaian pada tahun 2020 tercapai sebesar 76,58%, capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,43%. Apabila capaian Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 90 maka capaian Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran tahun 2021 terhadap target 2024 tercapai sebesar 103.34%

Tercapainya Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Unit Eselon II Bappebti terkait dengan layanan kepegawaian misalnya pengelolaan administrasi pegawai, sosialisasi terkait peraturan atau edaran kepegawaian, serta pengadaan sarana operasional penunjang pekerjaan.

Untuk mencapai Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran dilaksanakan beberapa kegiatan seperti :

a. Pengadaan Sarana Internal BAPPEBTI

Penyediaan bahan untuk keperluan kerja guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan sehingga perlu dipersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan keperluan layanan sarana dan prasarana Internal (Overhead), diantaranya yaitu Peralatan dan Mesin yaitu penyediaan alat pengolah data dan peralatan elektronik dan peralatan fasilitas perkantoran, dan pengadaan software. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan penunjang pekerjaan seperti pengadaan PC, printer, scanner, ATK, filing kabinet, dan sarana lain yang menunjang pekerjaan.

b. Pengelolaan Organisasi dan Tata Kelola Internal BAPPEBTI.

Layanan Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan di lingkungan BAPPEBTI dalam pengelolaan keuangan, peningkatan Sumber Daya Manusia seperti :

Layanan Layanan Organisasi Dan Tata Kelola Internal ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan di lingkungan BAPPEBTI dalam pengelolaan keuangan, peningkatan Sumber Daya Manusia seperti :

- Penilaian Wilayah Tertib Administrasi

Penilaian Wilayah Tertib Administrasi (WTA) merupakan suatu penilaian yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan unit kerja Kementerian Perdagangan. Penilaian Wilayah Tertib Administrasi telah dilaksanakan setiap tahunnya yang dimulai sejak tahun 2010 dengan tujuan mendorong internalisasi program reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pengendalian intern dan meningkatkan budaya kesadaran anti korupsi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penilaian WTA di lingkungan BAPPEBTI agar memenuhi kualifikasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dimulai dengan penunjukan pegawai sebagai penanggung jawab yang menangani pada setiap komponen penilaian WTA. Adapun Komponen yang dijadikan dasar penilaian WTA Online adalah Komponen SAKIP, Komponen BMN, Pengendalian Intern, Inisiatif anti Korupsi serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penilaian WTA di lingkungan BAPPEBTI yaitu dengan melakukan kegiatan Pendampingan Pengisian Evaluasi Penilaian WTA Online yang menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan pada tanggal 6 September 2021. Proses penilaian dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2021, pada proses penilaian telah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan mengacu kepada catatan yang diberikan oleh Auditor Inspektorat Jenderal agar memenuhi kriteria WTA. Penilaian WTA Online ini nantinya yang akan dijadikan acuan untuk mengukur tingkat efektifitas dan penerapan prinsip *Good Governance* pada tata kelola organisasi Bappebti. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kriteria WTA membuahkan hasil dengan BAPPEBTI meraih kriteria WTA Madya pada penyerahan penghargaan Wilayah Tertib Administrasi yang diberikan langsung oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 22 Desember 2021 . Bappebti meraih skor kumulatif 84,55 dan skor tiap komponen Penilaian berada diatas 78. Hal tersebut menunjukkan kemajuan dan perbaikan yang dilakukan BAPPEBTI karena pada tahun 2020, BAPPEBTI tidak memperoleh predikat WTA.

- Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi

Bentuk kegiatan ini berupa penyelenggaraan konsinyering terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bahan masukan pengembangan birokrasi ke depannya. BAPPEBTI telah melakukan kegiatan Evaluasi Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada tanggal 21 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha di lingkungan BAPPEBTI dengan menghadirkan Narasumber dari Inspektorat Jenderal. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk membuat peta resiko di lingkungan BAPPEBTI yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020. Dari evaluasi tersebut, BAPPEBTI telah membentuk struktur kelembagaan SPIP yaitu Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BAPPEBTI dan Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Konteks Manajemen Resiko dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BAPPEBTI. Pada bulan Agustus 2021 Bappebti melakukan perubahan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021.

Telah dilakukan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BAPPEBTI seperti :

- ✓ Penyusunan Pedoman Penanganan Gratifikasi di lingkungan BAPPEBTI yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07 Tahun 2021. Penyusunan pedoman penanganan gratifikasi ini dilaksanakan untuk mendukung efektifitas penanganan gratifikasi di lingkungan BAPPEBTI
- ✓ Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BAPPEBTI dalam rangka mengoptimalisasikan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- ✓ Melakukan sosialisasi pengelolaan penanganan pengaduan *Whistleblowing System* dengan Narasumber dari Inspektorat Jenderal dan di hadiri Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan serta para Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c. Pengembangan Kelembagaan

Bentuk kegiatan ini adalah rapat persiapan dan penyelenggaraan konsinyering pengembangan kelembagaan untuk membahas kondisi kelembagaan BAPPEBTI saat ini dan rencana pengembangan kelembagaan apabila terdapat perubahan nomenklatur dan struktur organisasi.

Bappebti melakukan kegiatan pengembangan kelembagaan berupa evaluasi SOP Makro di lingkungan Bappebti yang diadakan pada tanggal 29 November 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan.

d. Workshop Bidang Kepegawaian

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai BAPPEBTI. Bentuk kegiatan ini berupa workshop yang dilaksanakan di kantor BAPPEBTI. Diharapkan dengan diadakannya workshop tersebut akan meningkatkan pengetahuan Analis Kepegawaian dan Pemeriksa PBK yang bertugas sebagai Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK. Workshop bidang kepegawaian yang diadakan oleh Sekretariat BAPPEBTI pada adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Workshop Bappebti Tahun 2021

No	Tanggal Workshop	Materi Workshop	Narasumber	Jumlah Peserta Workshop
1	2 dan 4 Februari 2021	Workshop Orientasi CPNS : 1. Peraturan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi; 2. Kebijakan-kebijakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi; 3. Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK 4. Skema Sistem Resi Gudang dalam Tata Niaga Komoditas dan Pembiayaan Berbasis Komoditas	1. Koordinator Bidang Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum 2. Koordinator Bidang Pengembangan Pasar 3. Koordinator Bidang Audit 4. Subkoordinator Bidang Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang	18 Orang
2	2 Juni 2021	Penilaian Angka Kredit JF Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Tim Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perdagangan	25 Orang
3	27 Agustus 2021	Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK	Tim Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian	25 orang

No	Tanggal Workshop	Materi Workshop	Narasumber	Jumlah Peserta Workshop
			Perdagangan	
4	30 Agustus 2021	Pendampingan dalam rangka penyusunan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan SKP periode Juli – Desember 2021	Tim Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perdagangan	Seluruh Pegawai Bappebti
5.	8 Oktober 2021	Sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi	Kementerian PAN-RB BKN Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan	35 orang

e. Peningkatan Kinerja Pegawai BAPPEBTI.

Kegiatan ini diwujudkan melalui penerapan Penilaian Kinerja yang dilaksanakan dalam suatu manajemen kinerja berdasarkan PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS dan PermenpanRB No 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Peran Bagian Umum khususnya subkoordinator bidang kepegawaian adalah dengan melakukan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan transisi sistem penilaian kerja PNS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada tingkat JPT yang telah diintegrasikan dengan Perjanjian Kinerja (PK). Selanjutnya telah dilakukan cascading (penjabaran) kinerja dari JPT kepada pegawai di bawahnya sehingga Sasaran Kinerja Individu memenuhi prinsip berorientasi Outcome. Dengan begitu penilaian kinerja dapat dilakukan secara adil dan obyektif sehingga dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, membangun kebersamaan dan kohesivitas pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut penilaian kinerja yang tepat .

f. Pelatihan khusus bagi pegawai BAPPEBTI.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemeriksaan PBK, SRG dan PLK, BAPPEBTI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan mengadakan Pelatihan Teknis Perencanaan Pemeriksaan PBK/SRG/PLK Angkatan 2 pada tanggal 27 september sampai dengan 1 Oktober 2021. Pelatihan teknis ini diprioritaskan bagi calon Pemeriksa , Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Ahli Muda di lingkungan Bappebti. Peserta pelatihan berjumlah 20 Pegawai, sedangkan pengajar pelatihan teknis pemeriksaan PBK/SRG/PLK berjumlah 16 yang merupakan Pejabat Fungsional Pemeriksa PBK Ahli Utama,

Madya dan Muda di lingkungan Bappebti. Materi yang diajarkan dalam Pelatihan Teknis ini adalah Kebijakan Pemeriksaan PBK/SRG/PLK, Verifikasi Dokumen, Review dan Analisis Dokumen, Penyusunan Dokumen, Analisis Resiko, Analisis Laporan dan Pengaduan dan Penyusunan Pertanyaan BAP. Untuk menentukan kelulusan dan mengukur tingkat pemahaman peserta pelatihan, pada akhir Pelatihan dilaksanakan Studi Kasus dan ditutup dengan Seminar atas Studi Kasus.

Adapun pelatihan – pelatihan lain yang diadakan oleh Bappebti yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pelatihan Bappebti Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015	10 – 12 November 2021	20 orang
2.	Karya Tulis Ilmiah	22-25 November 2021	10 orang
3.	<i>Certified Information Systems Auditor CISA</i>	30 Nopember – 3 Desember 2021	5 orang
4.	<i>Multimedia with infographic</i>	1-3 Desember 2021	20 orang

g. Pengembangan Jabatan Fungsional BAPPEBTI

Pada tahun 2021 Pengembangan Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK diwujudkan dalam kegiatan penyusunan Modul Diklat JF Pemeriksa PBK yang merupakan rangkaian tindaklanjut proses pengalihan pegawai struktural BAPPEBTI kedalam jabatan Fungsional Pemeriksa PBK. Sebelumnya telah dilaksanakan Finalisasi Standar Kompetensi dan Kurikulum Silabi Pelatihan Pemeriksa PBK yang menjadikan Jabatan Fungsional Pemeriksa PBK merupakan jabatan fungsional bidang perdagangan pertama di Kemendag yang telah memiliki Standar Kompetensi dan Kurikulum Silabi. Pembahasan penyusunan Modul Diklat JF Pemeriksa PBK telah mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus dan 3 September 2021. Adapun hasil dari pembahasan dimaksud yaitu telah dibentuknya Tim Penyusunan Modul yang terdiri dari pegawai Bappebti dan Pusdiklat Perdagangan. Selanjutnya Tim Penyusun Modul yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Bappebti memiliki tugas untuk menyusun 4 (empat) materi modul. Target penyelesaian pengerjaan Modul Diklat ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober 2021.

h. Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Kegiatan ini merupakan koordinasi inventarisasi BMN BAPPEBTI tahun 2020, dimaksudkan agar pencatatan BMN BAPPEBTI update terhadap aturan dan kebijakan terkait BMN khususnya yang berasal dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, dan untuk mengetahui jumlah, nilai serta kondisi BMN BAPPEBTI yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada di daerah yang berstatus belum dihibahkan kepada daerah yang bersangkutan, serta sebagai upaya Sekretariat BAPPEBTI dalam mewujudkan tertib administrasi dan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN di Satker Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

i. Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Kegiatan ini merupakan koordinasi pemindahtanganan BMN BAPPEBTI tahun 2020, dimaksudkan agar tertib administrasi dalam pencatatan BMN BAPPEBTI khususnya yang peruntukan pengadaannya memang akan diserahkan ke daerah dalam bentuk hibah BMN, serta untuk melakukan penghapusan BMN yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak layak lagi digunakan atau jika dilakukan perbaikan dinilai tidak ekonomis dibandingkan jika dilakukan pembelian barang yang sama dengan fungsi yang sama.

j. Hibah BMN Dryer dan Rumah Dryer di Daerah

Kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari tindak lanjut hasil temuan BPK terhadap BAPPEBTI terkait Hibah atas Dryer dan Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen (Rumah Dryer) yang merupakan pengadaan tahun 2010, 2012 dan 2014. Pada tahun 2021 telah dilakukan proses hibah BMN untuk pengadaan tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hibah BMN yang telah selesai pada tahun 2021

No.	Kabupaten	Uraian Barang	Dok. Sumber	Penerima Hibah	SK Hibah	Keterangan
1	Cianjur, Jawa Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Cianjur	SK Kemendag No. 901 Tahun 2021 Tanggal 14/06/2021	BAST NO:13/M-DAG/BAST1/2021,15/1/2021
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:14/M-DAG/NH/1/2021, 15/1/2021
2	Bogor, Jawa Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Bogor	SK Kemendag No. 823 Tahun 2021	BAST NO:17/M-DAG/BAST1/2021,15/1/2021

No.	Kabupaten	Uraian Barang	Dok. Sumber	Penerima Hibah	SK Hibah	Keterangan
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		Tanggal 3/05/2021	NH NO:18/M-DAG/NH/1/2021, 15/1/2021
3	Sumedang, Jawa Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Sumedang	SK Kemendag No. 1610 Tahun 2021 Tanggal 20/12/2021	BAST NO:29/M-DAG/BAST2/2021,17/2/2021
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:30/M-DAG/NH/2/2021, 17/2/2021
4	Kuningan, Jawa Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Kuningan	SK Kemendag No. 823 Tahun 2021 Tanggal 3/05/2021	BAST NO:23/M-DAG/BAST2/2021,17/2/2021
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:24/M-DAG/NH/2/2021, 17/2/2021
5	Majalengka, Jawa Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka	SK Kemendag No. 823 Tahun 2021 Tanggal 3/05/2021	BAST NO:25/M-DAG/BAST2/2021,17/2/2021
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:26/M-DAG/NH/2/2021, 17/2/2021
6	Subang, Jawa Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Subang	SK Kemendag No. 824 Tahun 2021 Tanggal 3/05/2021	BAST NO:11/M-DAG/BAST1/1/2021,15/1/2021
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:12/M-DAG/NH/1/2021, 15/1/2021
7	Bantul, Yogyakarta	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	SK Kemendag No. 1340 Tahun 2020 Tanggal 30/12/2020	BAST NO:1049/M-DAG/BAST1/1/2020,16/11/2020
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:1050/M-DAG/NH/1/2020, 16/11/2020
8	Demak, Jawa Tengah	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Demak	SK Kemendag No. 640 Tahun 2020 Tanggal 26/08/2020	BAST NO:278/M-DAG/BAST6/2020,29/6/2020
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:279/M-DAG/NH/6/2020, 29/6/2020
9	Kudus, Jawa Tengah	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus	SK Kemendag No. 824 Tahun 2021 Tanggal 3/05/2021	BAST NO:19/M-DAG/BAST1/1/2021,15/1/2021
		Alat Pengering Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:20/M-DAG/NH/1/2021, 15/1/2021
10	Jejara, Jawa Tengah	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten	SK Kemendag No. 772	BAST NO:15/M-DAG/BAST1/1/2021,15/1/2021

No.	Kabupaten	Uraian Barang	Dok. Sumber	Penerima Hibah	SK Hibah	Keterangan
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Jepara	Tahun 2021 Tanggal 15/04/2021	NH NO:16/M-DAG/NH/1/2021, 15/1/2021
11	Pekalongan, Jawa Tengah	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Pekalongan	SK Kemendag No. 640 Tahun 2020 Tanggal 26/08/2020	BAST NO:280/M-DAG/BAST6/2020,29/6/2020
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:281/M-DAG/BAST6/2020,29/6/2020
12	Batola, Kalimantan Selatan	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Batola	SK Kemendag No. 991 Tahun 2020 Tanggal 02/11/2020	BAST NO:781/M-DAG/BAST6/2020,29/6/2020
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010			NH NO:782/M-DAG/NH/6/2020, 29/6/2020

Tabel 3.9

Proses BAST/NH untuk Pengadaan Tahun 2010

No.	Kabupaten	Uraian Barang	Dok. Sumber	Penerima Hibah	Keterangan
1	Solok, Sumatera Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Solok	Persetujuan Sekjen
		Alat Pengereng Dryer			ND: 1374/SJ-DAG/ND/12/2021, 30/12/2021
2	Tanah Datar, Sumatera Barat	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Tanah Datar	Persetujuan Sekjen
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		ND: 1375/SJ-DAG/ND/12/2021, 30/12/2021
3	Ngawi, Jawa Timur	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Ngawi	BAST NO:505/M-DAG/BAST/12/2021,20/12/2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		NH NO:506/M-DAG/BAST/12/2021,20/12/2021
4	Pasuruan, Jawa Timur	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten pasuruan	Persetujuan Sekjen
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		ND: 1366/SJ-DAG/ND/12/2021, 29/12/2021
5	Probolinggo, Jawa Timur	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Probolinggo	Persetujuan Sekjen
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		ND: 1365/SJ-DAG/ND/12/2021, 29/12/2021

No.	Kabupaten	Uraian Barang	Dok. Sumber	Penerima Hibah	Keterangan
6	Sampang, Jawa Timur	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten sampang	BAST NO:507/M-DAG/BAST/12/2021,20/12/2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		NH NO:508/M-DAG/BAST/12/2021,20/12/2021
7	Madiun, Jawa Timur	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun	BAST NO:503/M-DAG/BAST/12/2021,20/12/2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		NH NO:504/M-DAG/BAST/12/2021,20/12/2021
8	Jombang, Jawa Timur	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang	Permohonan Hibah 765/Bappebti.1/SD/12/2021, 30 Desember 2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		
9	Sumenep, Jawa Timur	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Sumenep	BAST NO:509/M-DAG/BAST/12/2021,20/12/2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		NH NO:510/M-DAG/NH/12/2021,20/12/2021
10	Gowa, Sulawesi Selatan	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Gowa	Permohonan Hibah 764/Bappebti.1/SD/12/2021, 29 Desember 2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		
11	Bantaeng, Sulawesi Selatan	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantaeng	Permohonan Hibah 764/Bappebti.1/SD/12/2021, 29 Desember 2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		
12	Bone, Sulawesi Selatan	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Bone	BAST NO:515/M-DAG/BAST/12/2021,24/12/2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		NH NO:516/M-DAG/NH/12/2021,24/12/2021
13	Sidrap, Sulawesi Selatan	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010	Dinas Perdagangan Kabupaten Sidrap	BAST NO:517/M-DAG/BAST/12/2021,24/12/2021
		Alat Pengereng Dryer	SPK Nomor:015/KNT-APBNP/PSRG/8/2010 tgl 02/08/2010		NH NO:518/M-DAG/NH/12/2021,24/12/2021

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum seperti :

- Adanya pandemic Covid-19 berdampak pada pelatihan yang dilaksanakan secara online sehingga pelaksanaan pelatihan tidak maksimal;

- masih terdapat BMN yang proses hibahnya belum selesai karena keterbatasan sumber daya;

Untuk meningkatkan pemberian layanan Kepegawaian dan Umum pada tahun mendatang akan dilakukan sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit Eselon II Bappebti terkait sarana prasarana kerja yang dibutuhkan, materi pelatihan yang akan dilakukan pada tahun mendatang;
- Tindaklanjuti proses hibah BMN yang belum selesai di tahun 2021;
- Tindak lanjut pelaksanaan diklat JF Pemeriksa PBK Jenjang Pertama;
- Pelaksanaan Inpassing JF Pemeriksa PBK Jenjang Pertama dan Muda;
- Penyusunan panduan penilaian DUPAK JF Pemeriksa PBK.

IK-4: Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik

Perkembangan kondisi yang dinamis dari industri PBK, PL dan SRG mengharuskan para praktisi, akademisi, pelaku usaha dan *stakeholder* untuk terus memperoleh informasi terkini terkait permasalahan yang dihadapi dan arah kebijakan yang akan diambil oleh otoritas maupun regulator di masing-masing bidang. Oleh karena itu melalui kegiatan sosialisasi BAPPEBTI berupaya membangun komunikasi untuk menjaga komitmen dan penyatuan pandangan serta kepentingan berbagai pihak dalam rangka pengembangan PBK, PL dan SRG dalam rangka mencapai tujuan akhir dari industri PBK, PL dan SRG.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian (%)
Presentase Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kerja Sama dan Informasi Publik	78%	84.73%	108.63%

Capaian Presentase Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kerja Sama dan Informasi Publik pada tahun 2021 tercapai sebesar 84.73% atau 108.63% dari target tahun 2021.

Pada 2021, Bidang Kerjasama dan Informasi Publik mencapai indeks kepuasan layanan sebesar 84,188. Berdasarkan pedoman, nilai indeks kepuasan masyarakat ini termasuk ke dalam mutu layanan 'B', dengan kriteria layanan 'Baik'. Hanya saja walaupun nilai tersebut masuk dalam kategori Baik, ternyata dari lima aspek yang diuji hanya satu aspek yaitu sarana dan prasarana (tangible) yang mempunyai nilai diatas indeks kepuasan layanan Kerjasama dan Informasi Publik bahkan mendekati kategori "Sangat Baik". Adapun empat aspek lainnya yaitu ketanggapan (responsiveness), keandalan (reliability), kepastian (assurance) , dan sikap (empathy) mempunyai nilai dibawah dari nilai indeks kepuasan layanan KIP sehingga keempat aspek tersebut dapat dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan kerjasama dan informasi publik sehingga indeks kepuasan dapat diperbaiki dan/atau ditingkatkan lagi.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dimana capaian Presentase Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kerja Sama dan Informasi Publik tercapai sebesar 80.21%, pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 5.63%. Apabila capaian Presentase Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kerja Sama dan Informasi Publik dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 90 maka capaian Presentase Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kerja Sama dan Informasi Publik tahun 2021 terhadap target 2024 tercapai sebesar 94.14%

Tercapainya indikator Presentase Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kerja Sama dan Informasi Publik disebabkan karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Unit Eselon II Bappebti maupun luar Bappebti sehingga layanan kerja sama dan informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk mencapai kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik didukung dengan beberapa kegiatan seperti :

a. Literasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Bappebti di Bidang PBK, SRG, dan PLK melalui kegiatan literasi telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut :

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Literasi sebanyak 6 (enam) kali, 5 kali dilaksanakan secara *online* dan 1 kali *hybrid* (online dan offline) dengan rincian:

- Literasi PBK online dengan tema: "Mengenal Perdagangan Fisik Aset Kripto di Indonesia" dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan peserta sebanyak 400 orang yang terdiri dari kalangan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

- Literasi PBK online dengan tema: “Pengaturan, Pengawasan dan Pembinaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi”, dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari Tipideksus Bareskrim POLRI, Reserse Kriminal Khusus Kepolisian daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, OJK di seluruh provinsi Indonesia, dan kalangan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas di seluruh Indonesia.
- Literasi SRG online dengan tema: “Penguatan Efisiensi Rantai Pasok dan Stabilitas Harga Komoditas Pangan” dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 dengan peserta sebanyak 447 orang yang terdiri dari perwakilan Disperindag provinsi, kalangan akademisi seluruh dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian di beberapa Universitas, Asosiasi, Pelaku Usaha, dan Pialang Berjangka, Pengelola Gudang, dan masyarakat umum.
- Literasi SRG online dengan tema: *Public Hearing* “Membangun Ekosistem Sistem Resi Gudang” dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 dengan peserta sebanyak 131 orang yang terdiri dari Pelaku Usaha, Asosiasi dan masyarakat umum.
- Literasi PBK online dengan tema: “*Do’s and Don’ts*: Investasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Bagi Millennial” dilaksanakan pada tanggal 17 September 2021 dengan peserta sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari para pelaku usaha, Civitas Akademika dari berbagai universitas di Indonesia, ASN, karyawan swasta, dan masyarakat umum.
- Literasi PBK *hybrid* dengan tema: “Peningkatan Transaksi Multilateral pad Industri Perdagangan Berjangka Komoditi” dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 dengan peserta online sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dan yang hadir di tempat acara sebanyak 100 (seratur) orang. Peserta terdiri dari para pelaku usaha, Civitas Akademika, perwakilan instansi yang membidangi perdagangan, dan masyarakat umum.

b. Dukungan Kehumasan

Dalam mendukung kegiatan Bappebti di bidang PBK, SRG dan PLK, diperlukan strategi komunikasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan baik. Bappebti melakukan berbagai program kegiatan dalam rangka penyampaian dan

penyebaran informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya adalah melalui:

- Penerbitan Buletin Bappebti
Pada Tahun 2021 akan diterbitkan Buletin Bappebti dimana materi yang disajikan menyangkut informasi dan edukasi tentang PBK, SRG, dan PLK. Sampai dengan saat ini telah terbit Buletin Bappebti tahun 2021 edisi Januari sampai Oktober 2021.
- Diseminasi Informasi Bappebti
Tabel berikut menyajikan Diseminasi Informasi Bappebti yang dilakukan pada tahun 2021.

Tabel 3.11
Diseminasi Informasi Bappebti Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Kemendag Terbitkan Peraturan Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto	10 Januari 2021	Jakarta
2	Berikan Kepastian Hukum Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti Blokir 1191 Entitas Tak Berizin Sepanjang Tahun 2020	19 Januari 2021	Jakarta
3	Kunjungi Brebes, Wamendag Tinjau Pelaksanaan Srg Bawang Merah Dengan Teknologi Cas	25 Januari 2021	Brebes
4	Kemendag Ajak Pemangku Kepentingan, Maksimalkan Pemanfaatan Srg Di Daerah	26 Januari 2021	Kudus
5	Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin	11 Februari 2021	Jakarta
6	Berikan Kepastian Hukum, bappebti Awasi Pelaku Usaha Aset Kripto Di Indonesia	18 Februari 2021	Jakarta
7	Optimalkan Peran Pbk, Srg, Dan Plk, kemendag Tanda tangani Perjanjian Kerja Sama Dengan Aprindo	26 Februari 2021	Jakarta
8	100 Domain Diblokir, Bappebti Tegas Lakukan Pengawasan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	<u>08 Maret 2021</u>	Jakarta
9	Kemendag Resmikan Implementasi Srg Dengan Teknologi Cas Di Brebes	16 Maret 2021	Brebes
10	Gerakkan Perekonomian Nasional Dan Tingkatkan Kesejahteraan, Pemerintah Dorong Penggunaan SRG	16 Maret 2021	Semarang
11	Optimalkan Peran PBK, Bappebti Kemendag Gencarkan Edukasi ke Kampus	6 April 2021	Malang
12	Dorong Sosialisasi dan Edukasi Perdagangan Berjangka Kopi, Kemendag Dukung Kolaborasi JFX dan AEKI	8 April 2021	Medan
13	Bertemu Bupati Batubara, Wamendag Dorong Implementasi SRG untuk Tingkatkan	9 April 2021	Batubara

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
	Kesejahteraan Petani		
14	Dukung Rantai Bisnis Produk Perikanan, Kemendag Optimalkan dan Perluas Pemanfaatan SRG	15 April 2021	Manado
15	Cegah Potensi Kerugian Masyarakat, Bappebti Kembali Blokir 105 Domain Situs Entitas Tak Berizin	15 April 2021	Jakarta
16	Optimalkan Pemanfaatan SRG sebagai Instrumen Perdagangan, Wamendag: SRG Berpotensi Mendukung Stabilitas Harga Pangan	22 April 2021	Jakarta
17	Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida	30 April 2021	Jakarta
18	Bappebti Kembali Blokir 137 Entitas Tak Berizin, Termasuk Penawaran Investasi Forex Melalui Penjualan Robot Trading	18 Mei 2021	Jakarta
19	Untuk Lindungi Masyarakat, Kemendag Blokir 622 Situs Web Tanpa Izin Bappebti	21 Juli 2021	Jakarta
20	Marak Penawaran Investasi Forex, Bappebti Kembali Blokir Domain Situs Web Tanpa Izin	18 Agustus 2021	Jakarta
21	Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Atas Nama PT Bursa Kripto Prima	25 Agustus 2021	Jakarta
22	Wamendag: Sinergi Kunci Bangun Ekosistem SRG Untuk Sejahteraan Petani	17 September 2021	Jakarta
23	Tindak Tegas, Kemendag Blokir 249 Domain Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin	18 September 2021	Jakarta
24	Gelar Forum Bisnis, Wamendag Dorong Kerja Sama Pengelola SRG dan Pengusaha Ritel	23 Desember 2021	Jakarta

c. SMS Center

Hotline Pengaduan Layanan Masyarakat (SMS Center Bappebti) merupakan suatu pusat layanan informasi melalui SMS bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Bappebti dan menyampaikan keluhan secara cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya ponsel. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan melalui nomor 0811-1109901. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2021 (Januari – Desember) SMS yang telah diterima dan direspon melalui SMS Center sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) SMS.

d. Media Monitoring

Media Monitoring Online Bappebti dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik terhadap kegiatan yang dilakukan Bappebti dan perkembangan

pemberitaan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) secara umum, sehingga dapat menentukan langkah strategis yang perlu dilakukan Bappebti dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan selama 1 (satu) tahun

e. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman (MoU)

Dalam upaya pengembangan pemanfaatan PBK, PLK dan Sistem Resi gudang telah dilakukan dua Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, pertama antara Bappebti dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tentang Optimalisasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas oleh Pelaku Usaha Ritel tanggal 26 Februari 2021 di Jakarta. Kedua Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bappebti dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia tentang Pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional tanggal 16 Maret 2021 di Semarang.

Dalam pelaksanaan pencapaian Presentase Kepuasan Publik Terhadap Layanan Kerja Sama dan Informasi Publik terdapat beberapa kendala seperti :

- Adanya pandemik berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan kurang optimal seperti literasi PBK, SRG dan PLK
- Adanya perjanjian kerja sama dengan instansi lain yang belum terealisasi dan masih memerlukan proses tindak lanjut.

Untuk mengoptimalkan pemberian layanan kerjasama dan informasi publik Bappebti pada tahun 2022 akan dilakukan:

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit Eselon II Bappebti terkait pemberitaan kegiatan yang dilakukan oleh unit Eselon II lain sebagai bahan informasi publik;
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka peninjauan perjanjian kerjasama maupun MoU.
- Pengelolaan SMS Centre yang lebih responsif;
- Peningkatan kompetensi jurnalistik SDM Bappebti melalui kegiatan pelatihan pegawai.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2021, Sekretariat BAPPEBTI dengan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Pagu Revisi menjadi Rp 38.271.685.000,- Dari pagu tersebut, nilai pagu untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 22.347.470.000,-. Berikut disampaikan data realisasi keuangan Sekretariat berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2021
Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan	794,576,000	790.013.291	99.43
2	Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	22,806,928,000	19.634.466.210	86.13
3	Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	12,916,097,000	12.522.742.713	96.95
4	Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik	1,754,084,000	1.551.399.184	88.44
TOTAL		38,271,685,000	34.507.621.398	90.16

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Sekretariat Bappebti pada tahun 2021 tercapai sebesar 90.16% dari pagu anggaran tahun 2021. Belum optimalnya pencapaian kinerja anggaran pada tahun 2021 dipengaruhi oleh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan adanya sisa anggaran gaji pegawai yang tidak terserap dengan maksimal.

BAB IV

PENUTUP

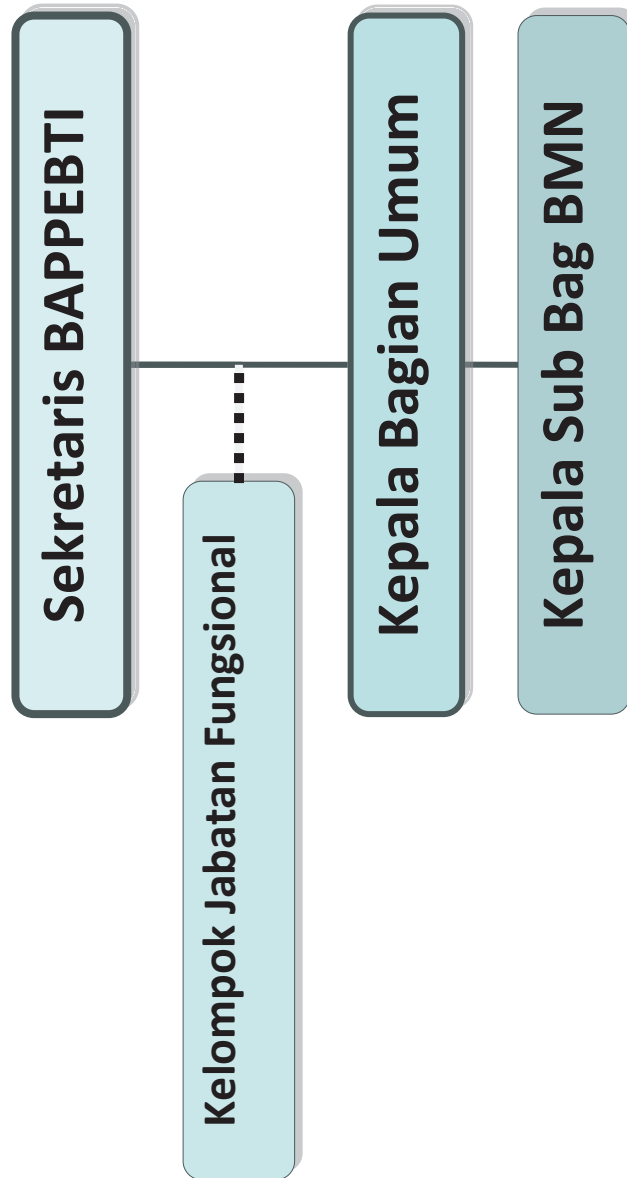
Selama tahun 2021, Sekretariat Bappebti secara umum telah mampu melaksanakan kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang berisi indikator sasaran-sasaran yang menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh institusi Sekretariat BAPPEBTI terhadap seluruh lini aktifitas kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Pasar Lelang Komoditas (PLK) dan Sistem Resi Gudang (SRG).

Jika memperhatikan tingkat rata-rata capaian kinerja IKU yang mencapai angka sebesar 109,53% dengan tingkat realisasi keuangan sebesar 90.16%, Sekretariat BAPPEBTI telah cukup efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan kerjanya. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor utama dalam mencapai keberhasilan dimaksud yaitu terlaksananya koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal, tersedianya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, serta penyediaan anggaran yang sudah cukup sesuai dengan beban kerja.


Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat pada tahun 2021, Sekretariat masih harus melakukan evaluasi lebih lanjut terutama pada aspek perencanaan pelaksanaan program, dan penganggaran. Hal dimaksudkan agar di tahun mendatang, kinerja Sekretariat Bappebti menjadi lebih baik.

Akhirnya kami berharap, Laporan Kinerja Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya sehingga target capaian kinerja Sekretariat di Tahun 2022 dapat tercapai dengan lebih optimal.

1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Bappebti



2. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 Gedung Bappabtik Lantai 3*-5
 Jl. Kramat Raya No. 102, Jakarta 10430
 Telp. (021) 52020202, Fax. (021) 51023204
 Website : <http://www.bappabtik.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NOMOR: C3 /BAPPEBTI.1/PK/01/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nusa Eka
 Jabatan : Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Sidharta Utama
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehausanya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua



Sidharta Utama

Jakarta, 21 Januari 2021

Pihak Pertama




Nusa Eka

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PREDIKSI CAPAIAN (%)				Penanggung Jawab
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran dan Pelaporan	85 %	80	85	90	100	Koordinator Program, Anggaran dan Pelaporan
		Nilai Tata Kelola Pengelolaan Keuangan	Nilai 82	80	85	90	100	Koordinator Keuangan
		Persentase Kepuasan Layanan Kepegawaian dan Operasional Perkantoran	82 %	80	85	90	100	Bagian Umum
		Persentase Kepuasan Publik terhadap Layanan Kerjasama dan Informasi Publik	78 %	80	85	90	100	Koordinator Kerjasama dan Informasi Publik


NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Layanan Perkantoran	34.185.563.000	10	40	70	100	
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2.067.189.000	5	40	70	100	
3	Layanan Sarana Internal	927.792.000	15	40	80	100	
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.397.236.000	10	40	60	100	
	JUMLAH	43.577.780.000	10	40	70	100	

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi



Sidharta Utama

Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi



Nusa Eka

FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit : Sekretariat BAPPEBTI

Periode : Tahun 2021

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% Capaian (5)
Meningkatnya pelayanan dukungan teknis dan administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan	85 %	84.40%	99.29%
	Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Nilai 82	90.25	110.06%
	Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	82 %	78.04%	95.17%
	Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik	78 %	84.73%	108.63%

Indikator Kinerja Kegiatan (6)	Output (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Pagu Anggaran (10)	Realisasi (11)
Persentase Kepuasan Layanan Penyusunan Program, Anggaran, Dan Pelaporan	Penyusunan dan Koordinasi Program Kerja BAPPEBTI	85 %			
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEBTI				
	Penyusunan dan Revisi RKAKL BAPPEBTI				
	Perencanaan Program dan Anggaran Dana Alokasi Khusus SRG				
	Optimalisasi Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi				
	Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi				
	Penyusunan Laporan Triwulan BAPPEBTI				
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI				
	Evaluasi Program Kerja BAPPEBTI				
	Penyusunan Laporan e-Monitoring				
	Monitoring Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi				

Indikator Kinerja Kegiatan (6)	Output (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Pagu Anggaran (10)	Realisasi (11)
	Penyusunan Laporan RDP dengan DPR Dukung Rapat Pimpinan				
Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Pengelolaan Gaji dan tunjangan Penyusunan Laporan Keuangan Satker BAPPEBTI Pelaksanaan Pemeriksaan / Audit Satker BAPPEBTI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan / Audit Pengelolaan Keuangan Satker BAPPEBTI Pengelolaan PNPB Satker BAPPEBTI	82			
Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	operasional perkantoran Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Jabatan Fungsional BAPPEBTI Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Workshop Bidang Kepegawaian Pembinaan Administrasi Kepegawaian Pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai Bappebti Pengelolaan Ketatausahaan Pencetakan Brosur dan Peraturan dan Perundangundangan Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Pemindahtanganan Barang Milik Negara Hibah BMN Dryer dan Rumah Dryer di Daerah	82 %			
Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik	Pengelolaan informasi website dan SMS Centre Bappebti Literasi di Bidang PBK, SRG dan PLK Dialog Interaktif di televisi dan radio	78 %			

Indikator Kinerja Kegiatan (6)	Output (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Pagu Anggaran (10)	Realisasi (11)
	Penyusunan Buletin Bappebti Iklan Layanan Masyarakat Diseminasi informasi kebijakan di bidang PBK, SRG dan Dukungan Kehumasan Bappebti Partisipasi dalam workshop, seminar, dan sosialisasi Pengelolaan informasi website dan SMS Centre Bappebti				

Jakarta, Februari 2022

SEKRETARIS,

Tuti Prahastuti